

REFORMASI HAK-HAK PEREMPUAN ARAB SAUDI MELALUI SAUDI VISION 2030 TAHUN 2017-2019

Analieza Ilmiatun Mufiedah

Setyasih Harini. S.IP. M.Si.

Halifa Haqqi. S.IP. M.Si.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

This research describes and analyse about the reformation of women's rights in Saudi Arabia along with the announcement of Saudi Vision 2030. Saudi Vision 2030 made because the Kingdom of Saudi Arabia wants to end its economic liability on oil and gas reserve. This research uses liberal feminism and constructivism theory. The purpose of this research is to establish about how Saudi Vision 2030 made few changes on the reformation of Saudi women's rights. This research uses qualitative method with secondary data collection and uses descriptive method. From the data collected, the writer analyses that Saudi Vision 2030 has made some mignificant changes to Saudi women's rights with some new policies made through 2017-2019 period of time which more gender friendly to achieve the goals of Saudi Vision 2030 so that Saudi Arabia no longer depending its economic sector on oil and gas reserves.

Keywords: Saudi Vision 2030, women's rights reformations, Saudi Arabia

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan perempuan Arab Saudi masih sangat terbatas dan Arab Saudi juga merupakan Negara yang memiliki indeks partisipasi perempuan yang paling sedikit dibandingkan Negara-negara lainnya di dunia. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut terutama berada di bidang pekerjaan dan bidang pendidikan. Kondisi inilah yang masih menjadi tugas Arab Saudi untuk membuat progres yang mengarah pada globalisasi (Alhareth, Yahya 2015:121).

Dikutip dari BBC News, Arab Saudi memiliki pemisahan yang spesifik antara

perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh paham Wahabisme yang masih menjadi paham utama dan menjadi dasar bagi banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya (bbc.com, 2017). Sejak kematian Raja Abdullah pada tahun 2015, pemerintahan Arab Saudi mengalami transisi kekuasaan. Raja Abdullah kemudian digantikan oleh adik tirinya yang juga merupakan menteri pertahanan sejak tahun 2012, Salman bin Abdul Aziz. Sebagai raja baru, Salman bin Abdul Aziz kemudian menunjuk putra mahkota baru dan sempat berganti sebanyak 3 kali sebelum keputusan akhirnya, yakni menunjuk putranya,

Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota yang hingga saat ini berada di garis tahta selanjutnya (Pradana 2018:2).

Agenda *Saudi Vision 2030* merupakan ‘aset besar’ menuju modernitas negara. Salah satunya adalah mengantar peran perempuan mengembangkan bakatnya dan bagaimana perempuan dapat menginvestasikan kemampuan yang dimiliki. Dikutip dari ‘*The Global Gender Gap Index 2010*’ dalam *World Economic Forum*, Arab Saudi menduduki peringkat 129 dari 134 negara yang menjunjung loyalitas persamaan hak perempuan dan jikapun *Saudi Vision 2030* terealisasi, diharapkan momen ini menjadi kesempatan pemerintah Arab Saudi menuju perubahan terutama dalam persoalan hak asasi perempuan dan isu gender (OHCHR 2017).

Akhir tahun 2017, kemudian Kerajaan Arab Saudi memperkenalkan beberapa reformasi dalam bentuk kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh Arab Saudi tersebut merupakan wujud dari pencapaian *Saudi Vision 2030* yang memiliki 3 pilar utama yaitu adalah *Vibrant Society*, *Thriving Economy*, dan *Ambitious Nations*, dimana *Saudi Vision 2030* dibentuk atas harapan agar Arab Saudi tidak terus-menerus bergantung pada sumber daya alamnya yaitu minyak dan gas lainnya yang bersifat menyusut dan dapat habis. *Saudi Vision 2030* juga merupakan perwujudan keseriusan Arab Saudi dalam mendukung Agenda Pembangunan 2030 United Nations yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Agenda Pembangunan Berkelanjutan ditargetkan terealisasi pada

tahun 2030 mendatang dan memiliki 17 poin yang salah satu diantaranya adalah tujuan nomor 5 yaitu kesetaraan gender. Komitmen Arab Saudi dalam mewujudkan tujuan nomor 5 tersebut menjadi bagian dalam *Saudi Vision 2030* yang membawa reformasi terhadap hak-hak perempuan di Arab Saudi.

B. DASAR TEORI

1. Feminisme

Feminisme merupakan cabang Ilmu Hubungan Internasional yang muncul terkait tatanan dunia yang cenderung membahas mengenai konflik, perang, dan perluasan kerjasama antar pelaku hubungan internasional dengan tidak merujuk pada subjek individu karena didominasi oleh subyek “sistem” dan “negara” yang cenderung mengabaikan peran serta wanita, baik dalam kegiatan ekonomi, berkehidupan dalam masyarakat, maupun dalam kegiatan politik (True, 2005:203).

a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal pertama kali diperkenalkan oleh Mary Wollstonecraft yang berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk yang rasional seperti laki-laki dan mampu untuk berkembang sesuai dengan kapasitas intelektual dan moralitas maksimalnya. Hal tersebut berarti bahwa perempuan juga memiliki hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik dan tidak tersingkirkan dalam ruang privat di rumah dan keluarga. Kaum feminis liberal memiliki ketertarikan untuk meningkatkan status dan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan akses dalam pengambilan kebijakan serta kekuasaan (Wendt et al. 2014:168). Dalam

perkembangannya, feminisme liberal telah mengalami berbagai fase. Pada abad ke-20, gerakan feminisme liberal terfokus pada gerakan pembebasan bagi kaum perempuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan dalam bidang ekonomi dan kebebasan dalam bidang sipil serta publik. (Tong 2009:335). Feminisme liberal yang berfokus pada peningkatan peran sosial perempuan di masyarakat merupakan teori yang bisa digunakan untuk menganalisis variabel penelitian terhadap reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi.

2. Konstruktivisme

Konstruktivisme muncul pada tahun 90-an dan memiliki gagasan pikiran pokok yakni bahwa struktur yang ada di masyarakat merupakan hasil dari gagasan-gagasan yang diyakini bersama. Gagasan lainnya adalah bahwa konstruktivisme merupakan keyakinan yang merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi dan berproses di masyarakat. Teori konstruktivisme berkeyakinan bahwa dunia sosial adalah wilayah yang intersubjektif (Jackson and Sorensen 2010:179).

Alexander Wendt menjelaskan bahwa identitas, tingkah laku, dan kepentingan individu dipengaruhi oleh keadaan sosial. Maka identitas, perilaku, dan kepentingan individu tidak secara alamiah ada dengan sendirinya dan murni muncul dari dalam individu tersebut. Namun identitas merupakan bentuk dari pengaruh lingkungan. (Zehfuss, 2002:39). Konstruktivis meyakini bahwa identitas sebuah negara dibentuk atas adanya aspek normatif yang berlaku dalam masyarakat. Identitas yang terbentuk dari adanya aspek normatif tersebut merupakan identitas yang akan membentuk dan

mempengaruhi kebutuhan serta tujuan dari sebuah negara. Dengan mengetahui kebutuhan tersebut, negara sebagai pelaku hubungan internasional akan dapat menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang muncul karena konstruksi norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Indikasi tersebut yang kemudian akan menentukan hubungan linear antara norma, identitas, kepentingan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh sebuah Negara (Hobson 2000:145).

Pada konteks ini aktor-aktor dalam ranah hubungan internasional menentukan identitasnya, kepentingannya dan akhirnya tindakan aktor tersebut. Konstruktivisme bukanlah pola yang diinduksikan dari fakta empirik. Ia justru sebaliknya merupakan gagasan yang dikonstruksi dari interaksi diantara banyak aktor. Konsep teori konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima system internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan dan struktur (Pramono and Purwono 2010:16).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menggambarkan laporan penelitian dengan narasi. Jenis ini adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan statistic atau perhitungan lainnya untuk memperoleh informasi. (Strauss and Corbin 2003).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti berupa informasi yang didapatkan dari buku,

jurnal, dokumen, majalah, dan bahan dari internet (Hendri 2009:17). Data yang peneliti peroleh berasal dari buku-buku dengan tema yang berkesesuaian dengan tema penelitian ini. Selain itu artikel jurnal dan website resmi juga merupakan rujukan lain yang peneliti gunakan sebagai salah satu sumber data yang mendukung penelitian ini. Begitupula dengan situs berita online yang kredibel dan terpercaya juga menjadi salah satu sumber data penunjang penelitian ini. Adapun objek penelitian tersebut antara lain adalah reformasi hak-hak perempuan Arab Saudi atas penerapan *Saudi Vision 2030* dalam jangka waktu tahun 2017 hingga tahun 2019.

D. PEMBAHASAN

1. PAHAM WAHABBISME DI ARAB SAUDI

Wahabisme adalah sebuah gerakan yang lahir di Arab Saudi, kemudian berkembang sejak abad ke-18. Ciri khas gerakan ini adalah untuk mengajak kembali kepada Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta ajaran-ajaran para sahabat dan ulama yang terdahulu. Istilah wahabi sering digunakan untuk merepresentasikan pemikiran di Arab Saudi yang digunakan oleh banyak gerakan pembaharuan Islam. Beberapa ciri khas pemikiran wahabi dan dapat dibedakan dengan aliran atau mazhab yang lain dalam islam adalah teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an atau hadits yang berkesinambungan dengan sifat Allah. Teks dalam Al-Qur'an dan hadits tersebut dipahami secara harfiah oleh penganut wahabisme (Aswar 2016:16-17).

Perkembangan wahabisme di Arab Saudi berada di puncak kejayaan sejak abad

ke-19 hingga abad ke-20. Penerimaan terhadap gerakan wahabisme berkembang dengan pesat di wilayah Arab Saudi saat itu karena gerakan/ajaran tersebut juga diadaptasi dan diyakini oleh Raja Muhammad bin Saud yang kemudian memberi pengaruh pada masyarakat dan pengikutnya untuk terus mengembangkan dan melestarikan ajaran wahabisme, dan memasukkannya dalam versi rasional islam yang reformatif (Haif 2015:12-13)

Di Arab Saudi, banyak kategori pemisahan antara perempuan dan laki-laki karena adanya aliran wahabisme yang memiliki peran penting dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi (News 06/17/2013). Wahabbisme adalah satu satunya paham agama yang bisa secara terbuka dipraktekkan di Arab Saudi. Bukan hanya dalam konteks pengaruh dan penyebaran pemikiran serta ajaran di Arab Saudi, namun juga dalam konteks kesesuaian fisik dalam pakaian hingga doa dalam lingkup public. Diantaranya yang paling signifikan adalah, warisan paham Wahhabi diwujudkan dalam etos sosial dimana pemerintah dianggap memiliki tanggung jawab atas moralitas kolektif masyarakat, dari perilaku individual sampai bisnis dan pemerintahan itu sendiri (Arabia 2016:2-3)

Pemisahan gender merupakan bagian sentral dari visi moral Wahhabi Saudi. Perempuan membutuhkan perwalian pria atau lebih dikenal dengan istilah sistem perwalian Arab Saudi dalam sistem mereka, dimulai dari perwalian Ayah, dan jika nantinya perempuan tersebut menikah, perwalian tersebut akan digantikan oleh suaminya. Perempuan juga diharuskan untuk

mengenakan abaya hitam (jubah longgar) dan niqab (kerudung wajah) di hadapan publik. Kesempatan dalam akses pendidikan dan pekerjaan juga dibatasi.

Selain larangan-larangan tersebut, menurut wahabis, perempuan juga diharuskan untuk menutup seluruh tubuhnya dengan abaya dan jubah hitam yang menjulur menutupi badan, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh, walaupun peraturan berpakaian tersebut menyebabkan ketidaknyamanan baik secara fisik maupun emosional, bahkan jika aturan tersebut menyiksa wanita. Perempuan diharuskan untuk memenuhi keinginan suaminya dan mengesampingkan apapun yang diinginkan oleh perempuan tersebut. Kepercayaan ini tidak hanya diterapkan dalam batasan rumah tangga dan ekonomi, tetapi juga termasuk pemenuhan hasrat seksual sang suami bahkan jika suami telah berlaku tidak baik dan memaksakan istrinya (Gorman 2006:22-24).

Di Arab Saudi, masih banyak terjadi perilaku tidak adil antara laki-laki dan perempuan karena paham Wahabbisme yang masih melekat pada negara tersebut, dan menjadikan paham Wahabbisme sebagai dasar dalam membuat banyak kebijakan (News 06/17/2013). Sedikitnya partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan, menunjukkan bahwa Arab Saudi sangat lekat dan kental dengan ajaran Wahabbisme didalamnya. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Madawi Al-Rasheed dalam bukunya, *A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia*, menunjukkan bahwa interpretasi terhadap islam dulunya merupakan alat untuk melimitasi keberadaan perempuan dalam

kegiatan publik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bawa perempuan tidak dapat mendapatkan posisi sebagai pegawai sipil (Sanauddin 2013:3).

2. PENGARUH PBB MELALUI AGENDA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER ARAB SAUDI

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi tujuh belas (17) Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Agenda Pembangunan Berkelanjutan tidak mengikat secara hukum. Negara-negara anggota PBB diharapkan untuk mengambil kebijakan dan kerangka pikir nasional dalam pencapaian seluruh agenda pembangunan berkelanjutan tersebut (United Nations 2015). Dalam tujuh belas (17) poin Agenda Pembangunan Berkelanjutan, peneliti berfokus pada tujuan nomor 5 yaitu adalah kesetaraan gender. Isu gender ini merupakan isu yang dapat dikhawatirkan karena tingginya tingkat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di dunia. Di beberapa negara, perempuan dipersulit dalam mendapatkan nutrisi dan fasilitas kesehatan yang memadai, kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang setara, dan masih banyak lainnya dalam berbagai sektor kemasyarakatan.

Kebijakan-kebijakan di Arab Saudi terhadap kesetaraan gender, seperti yang dilaporkan oleh PBB, bahwa kerajaan Arab Saudi turut ikut andil dalam pemilihan dewan *UN Women's Right Comission* pada tahun 2017. Menurut PBB, Arab Saudi adalah 1 dari 45 negara yang mengikuti panel untuk mempromosikan kesetaraan gender dan

pemberdayaan gender. Pemilihan Arab Saudi sebagai anggota komisi didukung oleh 47 negara termasuk 3 negara Eropa. Ketetapan yang dilakukan oleh PBB untuk menjadikan Arab Saudi sebagai dewan komisi, adalah upaya dan bentuk dukungan atas proses yang sedang dilakukan Arab Saudi dalam upaya mereduksi hal-hal yang bertentangan dengan kesetaraan gender (Agerholm 04/24/2017). Terlebih lagi, pada bulan April 2018, Arab Saudi dipilih untuk menjadi dewan eksekutif *UN Entity for Gender Equality* atas pemberdayaan perempuan dan akan aktif mengambil kebijakan mulai tahun 2019 hingga 2021 (Khalife 02/20/2017).

C. SAUDI VISION 2030

Saudi Vision 2030 adalah kerangka kerja Arab Saudi yang disahkan oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman pada masa pemerintahan Raja Salman. *Saudi Vision 2030* pertama kali dikenalkan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman pada tahun 2016. *Saudi Vision 2030* bermuatan tentang tujuan jangka panjang dan dibentuk berdasarkan kekuatan dan kemampuan unik yang dimiliki oleh Kerajaan Arab Saudi. Perubahan besar yang direncanakan dalam *Saudi Vision 2030* didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memperbaiki seluruh kualitas kehidupan di Kerajaan Arab Saudi dan menguntungkan masyarakat Arab Saudi serta menarik investasi domestik dan luar negeri (Abdellatif 10/28/2019).

Arab Saudi dikenal sebagai negara pengekspor petroleum terbesar dan merupakan negara yang memiliki 18% cadangan minyak dunia. Pada tahun 2014 sampai 2015 harga minyak mengalami

penurunan drastis. Harga minyak turun hingga 50%, dari harga \$100 menjadi \$46. Hal tersebut membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap sektor ekonomi dan sektor sosial Kerajaan Arab Saudi (McKinsey Global Institute 2015). *Saudi Vision 2030* dicanangkan berdasarkan rencana yang dibuat karena ketidakstabilan harga minyak tersebut. Rancangan rencana yang terdapat dalam *Saudi Vision 2030* diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Kerajaan Arab Saudi terhadap sumber daya alam terutama minyak bumi dan menggantikannya dengan sumber pemasukan negara yang lainnya, begitupula dengan melakukan pengaturan ulang terhadap pengeluaran negara (Kinninmont 2017).

Saudi Vision 2030 memiliki 3 pilar utama yaitu *A Vibrant Society*, *Thriving Economy*, dan *An Ambition Nation*. Proses secara berkala yang diraih oleh Kerajaan Arab Saudi merupakan wujud komitmen dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Selain hal tersebut, Kerajaan Arab Saudi juga telah berpartisipasi dalam banyak konferensi dan workshop yang berkesinambungan dengan Agenda Tujuan Berkelanjutan, yang kemudian memberikan hasil dan pencapaian melalui sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sepadan dan setara dengan apa yang tertulis di *Saudi Vision 2030* (General Authority for Statistics Saudi Arabia 2018). Beberapa dari perubahan dan reformasi yang telah dilakukan oleh Putra Mahkota Salman dalam mewujudkan *Saudi Vision 2030* adalah reformasi politik, modifikasi ekonomi, dan reformasi sosial.

Kebijakan-kebijakan lainnya yang termasuk dalam reformasi sosial atas dicanangkannya *Saudi Vision 2030* merupakan kebijakan yang paling membawa pengaruh besar sepanjang sejarah Kerajaan Arab Saudi terutama untuk wanita. kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Arab Saudi dalam kurun waktu 2017-2019 untuk mendukung terwujudnya *Saudi Vision 2030* yang berpengaruh terhadap reformasi hak-hak perempuan antara lain:

- a. Tahun 2017 : pemerintah Arab Saudi menunjuk Sarah Al Suhaimi sebagai Kepala Bursa Saham Arab Saudi yang baru dan membuatnya menjadi perempuan pertama yang memimpin Tadawul (bursa saham Arab Saudi). (stepfeed.com, 2017 diakses pada 11/12/2019). Pada bulan Mei 2017, perempuan untuk pertama kalinya bisa pergi ke dokter dan mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tanpa memerlukan pendamping atau wali laki-laki laki (indiatoday.in, 2017 diakses pada 11/12/2019). Pada bulan November 2017, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan program transportasi baru bernama Wusool yang dirancang khusus untuk pekerja perempuan. Mayoritas pekerja perempuan dari sektor privat berada dalam bidang ritel dan pelayanan. Kedua sektor tersebut menjadi fokus utama pemerintah Arab Saudi untuk mendorong perempuan agar memasuki ketenagakerjaan (alj.com, 2018 diakses pada 12/12/19).
- b. Tahun 2018 : Pada tahun 2018 keluarga-keluarga di Arab Saudi dapat memasuki

gelanggang olahraga di 3 (tiga) kota besar yaitu Riyadh, Jeddah, dan Dammam. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah dan tidak mengecualikan perempuan untuk turut serta menonton dalam gelanggang olahraga yang ada. Seperti yang dikutip dari alaraby.co.uk (diakses pada 12/12/2019), Kementerian Perdagangan dan Investasi Arab Saudi, Abdul Rahman Al-Hussein menyatakan pernyataan dalam laman resmi pemerintah Arab Saudi bahwa perempuan boleh meluncurkan usahanya sendiri dengan bebas dan mendapatkan layanan elektronik pemerintah (*governmental e-services*) tanpa memerlukan bukti izin dari wali laki-lakinya.

Salah satu kebijakan pada tahun 2018 lainnya yang paling signifikan adalah bahwa perempuan Arab Saudi sudah diperbolehkan untuk menyetir dan mengendarai kendaraan pribadinya secara legal (nytimes.com, 2017 diakses pada 12/12/2019) Pernyataan ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Putra Mahkota Salman pada tahun 2017, namun keputusan legal baru berlaku pada bulan Juni 2018 keputusan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi disiarkan secara langsung di seluruh dunia.

- c. Tahun 2019 : Kementerian Administrasi Perkotaan dan Pedesaan (*Ministry of Municipalities and Rural Affairs*) seperti yang dikutip dari Aljazeera.com (diakses pada 12/13/2019) menyatakan bahwa restoran-restoran di Arab Saudi tidak lagi memerlukan pintu masuk yang

berbeda berdasarkan jenis kelamin. pada bulan Agustus 2019 saat mulai diperbolehkannya perempuan berumur diatas 21 (dua puluh satu) tahun untuk bepergian (*travelling*) tanpa izin resmi dari wali laki-lakinya (businessinsider.sg, 2019 diakses pada 14/12/2019). Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan adanya program Visa yang baru yang bertujuan untuk menarik wisatawan asing yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Seperti yang dikutip dari Aljazeera.com (diakses pada 14/12/2019), Kepala Dinas Pariwisata, Ahmed Al-Khatib, dalam sebuah interview resmi mengumumkan bawa abaya atau jubah tidak lagi diharuskan untuk wisatawan perempuan, tetapi tetap mengharuskan pakaian yang sopan termasuk disekitar pantai.

Kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut merupakan langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai *Saudi Vision 2030* dan dapat dianalisis menggunakan teori feminisme liberal dan konstruktivisme. Menurut analisis peneliti, kebijakan tersebut searah dengan teori feminisme liberal yang dijelaskan oleh Mary Wollstonecraft bahwa perempuan adalah makhluk yang rasional dan mampu berkembang sesuai dengan kapasitas intelektual dan moralitas maksimalnya, dimana perempuan Arab Saudi yang mulai merdeka (*liberated*) juga memiliki hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik dan tidak tersingkirkan dalam ruang privat di rumah dan keluarga seperti yang terjadi sebelum adanya kebijakan ramah perempuan yang mulai dicanangkan dalam rangka pencapaian *Saudi*

Vision 2030 yang mengacu pada keberhasilan Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang sudah disetujui dan diratifikasi oleh Kerajaan Arab Saudi.

Dalam proses tersebut, terjadi beberapa pertentangan yang timbul dari ulama konservatif terhadap longgarnya struktur sosial yang terjadi selama perubahan menuju *Saudi Vision 2030*. Sheikh Abdelaziz Al Tarifi, seorang ahli hukum mengkritik keputusan tersebut dan menganggapnya sebagai pengaruh dunia barat yang tidak sesuai dengan budaya Arab Saudi. Al Tarifi kemudian dilaporkan ditangkap dan diselidiki oleh pihak berwajib yang kemudian dilepaskan tanpa hukuman. Pada bulan Februari 2017, Abdelaziz Al Sheikh sebagai mufti besar, mengeluarkan pernyataan peringatan tentang bahaya moral bioskop dan konser tanpa mengatakan secara eksplisit bahwa konser dan bioskop tidak semestinya diperbolehkan. Kepala GEA (*General Authority of Entertainment*) Arab Saudi, Ahmed Al Khateeb, dilaporkan mengunjungi Abdelaziz Al Sheikh tidak lama setelahnya dan menekankan bahwa hukum Syariah akan tetap dihormati. (Kinninmont 2017, diakses pada 9/11/2019).

Salah satu faktor terbesar atas perubahan norma dan identitas negara adalah karena kepentingan negara yang juga mengalami perubahan. Arab Saudi sebagai negara yang kaya akan produksi minyaknya mulai menyadari bahwa minyak adalah sumber daya yang akan habis, maka dari itu pemerintah Arab Saudi mulai memikirkan solusi dan rencana-rencana baru untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya *Saudi Vision 2030*, Arab Saudi

mengharapkan negaranya tidak lagi bergantung pada sektor minyak namun juga dapat mengembangkan sektor pariwisatanya. Tujuan tersebut sejalan dengan kebijakan yang dicanangkan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang memberikan kesempatan yang sama bagi para perempuan Arab Saudi untuk mengambil peran dalam masyarakat. (Cempaka 2018:52-53).

E. KESIMPULAN

1. *Saudi Vision 2030* mengacu pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang sebelumnya telah disetujui dan diratifikasi oleh Arab Saudi, dimana salah satu poinnya merupakan kesetaraan gender yaitu pencapaian kesetaraan dalam melibatkan laki-laki dan perempuan kedalam aspek kemasyarakatan Arab Saudi. Hal tersebut kemudian membawa pemerintah Arab Saudi kepada kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah baru yang lebih ramah gender. Adapun bentuk dari

kebijakan-kebijakan tersebut adalah kebijakan dalam bentuk modifikasi ekonomi, reformasi politik, dan reformasi politik dimana ketiga bentuk kebijakan tersebut sudah jauh lebih ramah gender dan memerdekakan perempuan.

2. Peneliti dapat menyimpulkan prediksi bahwa *Saudi Vision 2030* membawa pengaruh terhadap hak-hak perempuan di Arab Saudi dalam kurun waktu 2017-2019 sebagai proses pencapaian *Saudi Vision 2030* di tahun 2030 mendatang. Namun penulis belum dapat menyimpulkan apakah *Saudi Vision 2030* berpengaruh sepenuhnya terhadap reformasi hak-hak perempuan Arab Saudi karena belum terpenuhinya periode penerapan *Saudi Vision 2030* yang akan selesai pada tahun 2030 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdellatif, Reem (10/28/2019): What you need to know: A timeline of Saudi Arabia's Vision 2030 reforms. Alarabiya. Available online at <https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2019/10/28/What-you-need-to-know-A-timeline-of-Saudi-Arabia-s-key-Vision-2030-reforms.html>, checked on 11/11/2019
- alarabiya.co.uk (02/18/2018): Saudi women to start own businesses without male permission. Alarabiya. Available online at <https://www.alaraby.co.uk/english/society/2018/2/18/saudi-women-to-start-own-businesses-without-male-permission>, checked on 12/12/19.
- Alhareth, Yahya; Alhareth, Yasya; A. Dighrir, Ibtisam (2015): Review of Women and Society in Saudi Arabia p.1 Available online at https://www.researchgate.net/publication/276375656_Review_of_Women_and_Society_in_Saudi_Arabia. checked on 5/22/2019
- alj.com (01/31/2018): A changing future: the economic role of women in Saudi Arabia. ALJ.com. Available online at <https://www.alj.com/en/perspective/changing-future-economic-role-women-saudi-arabia/>.
- Aljazeera (9/12/2019): Saudi Arabia ends gender-segregated entrances for restaurants. Aljazeera. Available online at <https://www.aljazeera.com/news/2019/12/saudi-arabia-ends-gender-segregated-entrances-restaurants-191208171725619.html>, checked on 12/13/2019.
- Aljazeera (27/12/2019): Saudi Arabia will issue new visas, relax dress code for tourists. Aljazeera. Available online at <https://www.aljazeera.com/ajimpact/saudi-arabia-issue-visas-relax-dress-code-tourists-190927045326165.html>, checked on 12/14/2019.
- Aswar, Hasbi (2016): POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDIDAN AJARAN SALAFI-WAHABI DI INDONESIA, pp. 16–17, checked on 3/10/2019.
- BBC NEWS (10/29/2017): Saudi Arabia to allow women into sports stadiums. BBC News. Available online at <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41798481>.
- Cempaka, Miranda (2018): SAUDI ARABIA'S REFORMATION UNDER CROWN PRINCE SALMAN ON WOMEN'S RIGHTS (2017-2018). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- General Authority for Statistics Saudi Arabia (2018): Sustainable Development Goals (SDGs) in KSA (Status-quo Statistical Report) 2018. Saudi Arabia. Available online at https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/sustainable_development_goals_sdgs_in_ksa-en.pdf, checked on 11/19/2019.
- Gorman, B. C. (2006): THE GREEN GLASS CEILING: GENDER INEQUALITY AND WAHHABI POLITICAL INFLUENCE. Georgia State University. Available online at https://getd.libs.uga.edu/pdfs/gorman_brandon_c_200905_ma.pdf, checked on 1/10/2019.

- Haif, A. (2015): *Perkembangan Islam di Arab Saudi III* (1), pp. 12–13. Available online at <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/download/1357/1318>, checked on 1/10/2019.
- Hendri, Jhon (2009): *Riset Pemasaran*, checked on 9/18/2019
- Hobson, J. M. (2000): *The state and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press. Available online at <http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam032/99045364.pdf> checked on 5/25/2019
- Hubbard, Ben (09/26/2017): Saudi Arabia Agrees to Let Women Drive. The New York Times. Available online at <https://www.nytimes.com/2017/09/26/world/middleeast/saudi-arabia-women-drive.html>.
- India Today (10/7/2017): Women in Saudi Arabia can now go to the doctor and study without a man's permission. India Today. Available online at <https://www.indiatoday.in/fyi/story/saudi-arabia-women-without-man-permission-king-salman-order-976076-2017-05-09>, checked on 12/11/2019.
- Khalife, Leyal (02/20/2017): Saudi Arabia hired a woman to chair its stock exchange for the first time ever. Stepfeed. Available online at <https://stepfeed.com/saudi-arabia-hired-a-woman-to-chair-its-stock-exchange-for-the-first-time-ever-9149>, checked on 12/11/2019
- Kinninmont, Jane (2017): *Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract Austerity and Transformation*. Chatham House The Royal Institute of International Affairs. Available online at <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2017-07-20-vision-2030-saudi-kinninmont.pdf>, checked on 9/11/2019.
- News, M. W. (06/17/2013): Women's Rights in Saudi Arabia: Wahhabism vs. Islam, 06/17/2013. Available online at <https://www.morocoworldnews.com/2013/04/87234/womens-rights-in-saudi-arabia-wahhabism-vs-islam/>.
- OHCHR (2017): *Report of The Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights on his mission to Saudi Arabia, 6-23 June 2017, Thirty Fifth Session Human Right Council, Agenda Item 3, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including The Right to development*. Available online at http://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/d_res_dec/A_HRC_35_L.31.docx, checked on 5/22/2019.
- Perper, Rosie; Pasley James (2/8/2019): Saudi Arabian women no longer need a man's permission to travel. Here are the biggest changes they've seen in the last 2 years. Business Insider. Available online at <https://www.businessinsider.sg/womens-rights-in-saudi-arabia-driving-ban-2018-3/?r=US&IR=T>, checked on 12/14/2019.

- Pradana, Agni Vidya (2018): *Biografi Tokoh Dunia: Salman bin Abdulaziz, Raja Ketujuh Arab Saudi*, 12/31/2018. Available online at <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/31/11110051/biografi-tokoh-dunia--salman-bin-abdulaziz-raja-ketujuh-arab-saudi?page=2>, checked on 5/23/2019.
- Pramono, Sugiarto; Purwono, Andi (2010): *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Ggasan dan Posisi Teoritik*, p. 16. Available online at <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/485> checked on 2/25/2019
- Sanauddin, Noor (2013): *A Most Masculine State: Gender, Politics, and Religion in Saudi Arabia* by Madawi Al-Rasheed (12), p. 3. Available online at https://www.gla.ac.uk/media/media_298317_en.pdf, checked on 07/19/2019.
- Strauss, Ansem; Corbin, Juliet (2003): *Dasar-dasar penelitian kualitatif. Tatalangkah dan teknik-teknik teoritisasi data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tong, Rosemarie (2009): *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*: Perseus Books. p. 335
- Wendt, Alexander; Levy, Jack. S; Little, Richard (2014): *Metodologi ilmu hubungan internasional: perdebatan paradigmatic dan pendekatan alternative*: Intrans Publishing. p. 168
- Zehfuss, Maja. 2002. *Constructivism In International Relations : The Politics of Reality*, New York : Cambridge University Press.